

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, M. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Fikri Hadin. 2013. *Eksistensi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Genta Press.
- Coser, T. dan Anthony R. 1976. *An Introduction to International Politics*. New Jersey: Prentice Hall.
- Dwipayana, A. A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Pres, Yogyakarta.
- Jazim H. 2012. *Teori Hukum Perancangan Perda*. Malang: UB Press.
- LESTARI, F. A. 2020. *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Instruksi Presiden RI Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.
- Marzuki. P. M., 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Pattipawae, D. R. 2019. *Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Di Era Otonomi*. *Sasi*, Volume 25 Nomor 1.
- Pambudi, B., & Astrika, L. 2014. *Peran BPD dalam melaksanakan Fungsi Pengawasan Kepala Desa di Desa Sarimulyo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora*. *Journal of Politic and Government Studies*. Volume 3 Nomor 4.
- Pramesti, T. J. A. .2013. *Kedudukan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pasal 1 angka 13
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Rahman, M. I. N. 2021. *Analisis Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Peran Bpd Dalam Membentuk Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Rizaldy, I., Hannan, S., & Khalik, A. 2021. Kinerja Bpd Dalam Mengimplementasikan Peraturan Mendagri Nomor 110 Tahun 2016 Di Desa Salarri Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. *Mitzal (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*. Volume 6, Nomor 1.

Satjipto R. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82-95.

Syarifudin, A. dan Na'a, S. 2010. *Republik Desa*. Alumni: Bandung.

Sujanto. 1994. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika

Sri N. H. Susanto. *Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi, Administrative Law And Governance Journal*. Vol. 2, 2019

Terry dan Leslie dalam Sule dan Saefullah, 2005. *Pengantar Manajemen*. Kencana, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesi Thun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 5495

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*  
*Cet.Ke 2*. Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Widjaja. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

